

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

*Withdrawal Agreement* antara UK dengan EU berhasil dilakukan pasca referendum brexit karena pada negosiasi antara Boris Jhonson sebagai negosiator UK dengan Dewan Komisi EU *overlapping* dengan negosiasi antara Boris Jhonson dengan Parlemen UK. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara pihak domestik dan pihak internasional dalam negosiasi *Withdrawal Agreement*. Ketika Rancangan kesepakatan telah selesai dan berhasil dicapai negosiator UK dan EU, kesepakatan akan dinegosiasikan kembali kepada pihak domestik. Perbedaan terjadi ketika kepentingan domestik gagal disepakati oleh negosiator. Pada awalnya Theresa May mengajukan ketentuan *backstop* sebagai upaya meningkatkan kesepakatan, namun gagal karena justru dianggapnya pihak domestik merugikan kepentingan UK sehingga tidak *overlapping* dengan kesepakatan sementara dengan EU.

Kegagalan Theresa May terjadi ketentuan *backstop* yang mengikat Irlandia Utara untuk tetap berada di Pabean EU setelah masa transisi brexit berakhir. Ketentuan tersebut memicu ketidaksetujuan domestik UK, dimana terdapat perbedaan aturan yaitu *Custom Union* yang tidak menerapkan tarif di UK-EU , kemudian *Northen Ireland Only Arrangement* menerapkan aturan VAT atau PPn, sehingga terdapat pemeriksaan bea cukai ketika barang UK hendak masuk ke Irlandia Utara dan akan merugikan UK secara keseluruhan karena menghambat arus barang. Lalu terdapat penolakan dari DUP terkait *backstop* dimana UK

dianggap menjadi negara bawahan EU karena harus mematuhi aturan pabean EU saat berakhirnya masa transisi, kemudian *backstop* tanpa memiliki ketentuan jangka waktu akan merugikan UK karena perjanjian dagang dengan negara lain kan terhambat.karena perbedaan aturan. .

Perubahan kepentingan domestik yang lebih besar terjadi karena alternatif yang dibentuk Boris Jhonson sebagai Perdana Menteri baru yang menggantikan Theresa May untuk menyelesaikan proses brexit. *Backstop* sebagai hambatan digantikan oleh ketentuan hak veto Stormont sebagai *side payments* dimana setelah berakhirnya masa transisi, keputusan Irlandia Utara tetap bergabung dengan UE atau tidak akan di alihkan pada *Members of the Legislative Assembly* dan perubahan akan terjadi apabila Majelis Stormont memahasnya. Stormont mendapatkan peran penting dengan pemberian izin untuk memutuskan untuk tetap berada di pabean EU jika terjadi kegagalan negosiasi kesepakatan dagang selama masa transisi. Setelah periode empat tahun berakhir Stormont diminta melakukan pemungutan suara untuk tetap selaras dengan pabean EU sesuai kesepakatan atau tidak, dan anggota Majelis diberikan kesempatan membatalkan kesepakatan dalam waktu setiap empat atau jika periode pertama disetujui makan akan dilanjutkan dalam kurun waktu delapan tahun.

Adanya distribusi kekuasaan UK yang lebih menguntungkan legislatif dalam proses ratifikasi tetap dapat memperbesar persetujuan domestik pada era Boris Jhonson. Jhonson dapat meyakinkan Parlemen terkait isi kesepakatan dengan menghapus ketentuan *backstop* dalam *Withdrawal Agreement*, pengaruh preferensi masyarakat juga mendorong kekuatan domestik lebih besar. Masyarakat Irlandia

Utara menilai bahwa kerugian yang besar dari perbatasan keras di Irlandia membuat keputusan *Cost no Agreement* pada *Withdrawal Agreement* menjadi besar sehingga keputusan ratifikasi akan mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena tidak melakukan ratifikasi. Adapun koalisi anggota partai buruh dan sebagian anggota partai konservatif menekan Boris Jhonson untuk menghasilkan kesepakatan dan mencegah *No-deal* seperti yang diinisiasikan pada awal kepemimpinannya. *Meaningfull Vote* yang awalnya ditentukan Boris berhasil diamandemen kelompok koalisi dan berakhir pada penundaan sebagai pencegahan brexit tanpa kesepakatan. Selain itu, Institusi politik UK juga memberikan pengaruh pada ratifikasi sebab adanya praktik ratifikasi bergantung pada dominasi elemen utama Parlemen UK yaitu *House of Common*. Sehingga Boris Johnson sebagai negosiator hanya perlu memutuskan pilihan domestik berdasarkan tanggapan *Commons* setelah negosiasi yang dilakukan dengan Dewan EU.

Namun, penelitian ini memiliki kekurangan dimana tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai akhir dari permasalahan perbatasan keras di pulau Irlandia karena rentang waktu penelitian yang dilakukan hanya dari tahun 2016 hingga 2020. Adanya alternatif yang diberikan Jhonson dengan hak veto Stormont untuk melanjutkan Pabean EU dan jangka waktu empat tahun untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya keputusan sementara. Keputusan tersebut tidak dapat memberikan solusi pasti akan perbatasan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Pada akhirnya setelah masa transisi berakhir Irlandia Utara yang mendapatkan kerugian dari brexit. Dua pilihan yang dimiliki Irlandia Utara setelah transisi brexit berakhir yaitu mengikuti Pabean EU dengan konsekuensi

terhambatnya arus barang dengan UK atau memutuskan memveto aturan Pabean UE dengan konsekuensi menghancurkan Perjanjian Belfast yang ingin dilindungi setelah brexit terjadi. Kedua pilihan tersebut tidak dapat memberikan keuntungan dan perlindungan bagi Irlandia Utara maupun Republik Irlandia sehingga dibutuhkan penelitian selanjutnya untuk mendalaminya.

#### **4.2 Saran**

Merujuk pada kekurangan penelitian ini, penulis merekomendasikan pada peneliti selanjutnya untuk membahas masa depan Perjanjian Belfast setelah berakhirnya masa transisi brexit. Perjanjian ini menarik untuk dibahas karena dengan brexit apakah ketentuan hilangnya perbatasan apapun di wilayah Pulau Irlandia tetap terjaga atau justru menghasilkan perjanjian baru yang dilakukan antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia.